



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Marah Adin No. 01 Kel. Sawah Padang, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, email:perkim@payakumbuhkota.go.id, www.pkp.payakumbuhkota.go.id

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
		Isu Gender		Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
Program :								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Komitmen pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal mengatasi permasalahan masih terdapatnya rumah tidak layak huni terus meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa permasalahan masih terdapatnya rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sebuah isu strategis yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk tahun 2027 melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merencanakan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas ± 170 unit RTLH yang dibiayai oleh DAU. Diperkirakan lebih kurang 30% keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan ini dan kedepan akan diusahakan penambahan persentase keterlibatan perempuan sehingga optimalisasi kesetaraan gender dapat dicapai.	Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada kegiatan .Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb: a) Dari aspek Partisipasi: Keterlibatan perempuan masih sedikit dalam melakukan kegiatan tersebut ; b) dari aspek akses: terbatasnya akses perempuan dalam melakukan kegiatan tersebut ; c) Dari aspek Kontrol: Keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbatas; d) Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan2 khusus baik laki-laki dan perempuan karena keterbatasan akses kaum perempuan dan kontrol terhadap substansi.	1) Penerima manfaat Kegiatan adalah atas nama Kepala Keluarga 2) Belum tersedianya data pilah gender 3) Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak bekerja karena dianggap lebih mampu 4) terbatasnya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan	1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; 2) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3) Terbatasnya akses dan kapabilitas perempuan.	Tersusunnya kebijakan daerah Kota Payakumbuh tentang gender, pengarusutamaan gender dalam peningkatan kualitas RTLH sehingga menjadi aturan yang akan digunakan oleh masyarakat laki2 dan perempuan	Pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan keterlibatan perempuan, dan sosialisasi tentang kegiatan untuk mencapai tujuan	Beranjak dari masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh maka Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan Pembangunan rumah baru layak huni melalui kegiatan Keg.Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan sub kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.	input: 1 panduan penyusunan rencana kegiatan yang renspnsif gender 2; pelibatan minimal 30% perempuan pada saat pelaksanaan pekerjaan. output: 1 dokumen prioritas yang responsif gender, dengan adanya data terpilih penerima manfaat antara laki2 dan perempuan outcomes: Terakomodirnya perencanaan penyelesaian permasalahan rumah tidak layak huni yang melibatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.
Tujuan : Meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah yang sehat dan layak huni sehingga persentase rumah layak huni dapat ditingkatkan.								

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP); Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST. MT
NIP. 197103031997011001